

INTERAKSI ETNIS TIONGHOA DI KOTA MALANG (ABAD KE-18 – AWAL ABAD KE-20): SEBUAH POTRET RELASI SOSIAL-BUDAYA YANG KOMPLEKS

Destya Adi Rahmawan¹ dan Intan Cahyaning Handoyo^{1*}

¹Universitas Negeri Malang

*intanhandoyo2612@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the dynamics of interethnic relations between the Chinese, the Dutch, and the indigenous population in Malang City during the colonial period. The research employs a literature review method, analyzing historical sources such as archives, colonial government documents, and previous academic studies. The findings reveal that interactions among these ethnic groups were shaped by a hierarchical colonial social structure, with the Dutch dominating the political and administrative sectors, the Chinese playing a significant role in the economy, and the indigenous people occupying a subordinate position. Although interethnic relations were characterized by social segregation and discrimination, in certain contexts such as economic activities and daily life, pragmatic interactions emerged that reflected patterns of interdependence among the groups. These findings highlight the importance of a historical perspective in understanding the development of multiethnic social relations in Indonesia, and offer critical reflections on present-day issues of diversity.

Keywords: *social interaction, colonialism, Chinese ethnicity, Dutch, indigenous people, Malang City.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika hubungan antara etnis Tionghoa, Belanda, dan pribumi di Kota Malang pada masa kolonial. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber historis seperti arsip, dokumen pemerintah kolonial, serta kajian akademik sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antar etnis dibentuk oleh struktur sosial kolonial yang hierarkis, di mana Belanda mendominasi bidang politik dan administrasi, Tionghoa memainkan peran penting dalam sektor ekonomi, dan pribumi berada dalam posisi subordinat. Meskipun relasi antaretnis ditandai oleh segregasi sosial dan diskriminasi, dalam beberapa konteks seperti aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari, muncul interaksi pragmatis yang menunjukkan adanya pola ketergantungan antar kelompok. Temuan ini menegaskan pentingnya perspektif historis dalam memahami pembentukan pola hubungan sosial multietnis di Indonesia, sekaligus memberikan refleksi kritis terhadap isu-isu kebhinekaan di masa kini.

Kata Kunci: **interaksi sosial, kolonialisme, etnis Tionghoa, Belanda, pribumi, Kota Malang.**

Pendahuluan

Kota Malang, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya di Jawa Timur sejak abad ke-18, telah menjadi ruang interaksi dinamis antara berbagai kelompok

etnis, khususnya etnis Tionghoa, Belanda, dan pribumi. Kehadiran komunitas Tionghoa di Malang bukan hanya memperkaya mosaik sosial kota ini, tetapi juga berperan penting dalam membentuk dinamika ekonomi, budaya, dan politik lokal. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, kebijakan segregasi seperti *Wijkenstelsel* dan *Passverordering* memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial berusaha mengatur hubungan antar kelompok melalui pembatasan ruang gerak dan mobilitas sosial etnis Tionghoa. Namun, di balik pembatasan tersebut, komunitas Tionghoa justru mampu membangun jaringan sosial dan ekonomi yang kuat, menunjukkan daya adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi tantangan struktural.

Interaksi antara etnis Tionghoa dan Belanda dalam bidang ekonomi memperlihatkan hubungan yang kompleks dan saling bergantung, namun juga diwarnai ketegangan akibat kebijakan diskriminatif. Di sisi lain, relasi antara komunitas Tionghoa dan pribumi berkembang melalui hubungan perdagangan, kerja sama ekonomi, dan proses akulturasi budaya, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari friksi sosial akibat stratifikasi rasial kolonial. Berbagai organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan asosiasi dagang yang dibentuk oleh komunitas Tionghoa memperlihatkan strategi kolektif dalam mempertahankan identitas, memperjuangkan hak-hak sipil, dan mengembangkan ekonomi lokal di tengah tekanan kolonial.

Penelitian ini berusaha mengkaji secara kritis pola interaksi sosial, politik, dan ekonomi antara etnis Tionghoa, Belanda, dan pribumi di Kota Malang dari abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Dengan mengacu pada sumber arsip kolonial, studi historiografi, serta kajian sosial-budaya, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana komunitas Tionghoa beradaptasi, berkontribusi, dan bernegosiasi dalam ruang kolonial yang penuh batasan. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang sejarah sosial Indonesia, serta memberikan perspektif baru mengenai dinamika multikulturalisme di masa lalu sebagai refleksi bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif di masa kini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pola interaksi antar etnis Tionghoa, Belanda, dan pribumi di Kota Malang pada masa kolonial. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, laporan sensus kolonial, dokumen arsip, serta surat kabar lokal pada masa tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap literatur yang tersedia di perpustakaan, pusat arsip, serta basis data daring yang kredibel.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi dari sumber yang dikaji untuk memperoleh pola-pola interaksi yang terjadi. Validitas data diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai data dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Proses analisis dilakukan secara sistematis, dimulai dari tahap pengumpulan data, klasifikasi tema, analisis kritis, hingga penyusunan narasi sejarah yang logis dan argumentatif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antar etnis di Kota Malang pada masa kolonial.

Hasil dan Pembahasan

A. Interaksi Etnis Tionghoa dan Belanda

1) Interaksi Sosial dan Politik

Sejak abad ke-18, etnis Tionghoa telah memainkan peran yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari dinamika kehidupan sosial di Kota Malang. Peran mereka tidak hanya terbatas pada kontribusi dalam sektor ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial dan politik yang membentuk struktur masyarakat kolonial pada masa itu. Salah satu bentuk kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap komunitas ini adalah sistem *Wijkenstelsel*, yaitu aturan pemukiman yang mewajibkan kelompok etnis Tionghoa untuk tinggal di kawasan yang telah ditentukan secara khusus, yaitu daerah Pecinan (Junda, 2013). Kebijakan ini bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas masyarakat Tionghoa serta membatasi intensitas interaksi mereka dengan komunitas pribumi maupun masyarakat Eropa, dalam upaya menjaga dominasi sosial dan politik kolonial (Hudiyanto, 2015). Namun demikian, alih-alih melemahkan posisi sosial mereka, sistem segregatif ini justru mendorong komunitas Tionghoa untuk memperkuat struktur sosial internal mereka, membentuk jaringan solidaritas yang kokoh, serta membangun institusi-institusi sosial dan budaya yang mampu menopang keberlangsungan hidup komunitas di tengah keterbatasan ruang gerak yang diberlakukan secara sistematis oleh pemerintah kolonial.

Selain kebijakan *Wijkenstelsel* yang menetapkan batas geografis tempat tinggal bagi etnis Tionghoa di kawasan Pecinan, pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan regulasi tambahan berupa *Passverordering*, yaitu peraturan administratif yang mewajibkan setiap individu Tionghoa untuk memiliki surat izin khusus apabila ingin bepergian ke luar wilayah yang telah ditentukan (Schaik, 1996). Kebijakan ini dirancang untuk membatasi mobilitas fisik sekaligus sosial komunitas Tionghoa, sehingga memperkuat kontrol kolonial atas kelompok etnis yang dianggap strategis dalam struktur ekonomi lokal. Pembatasan-pembatasan semacam ini tidak hanya mengekang kebebasan gerak, tetapi juga berimplikasi pada penguatan identitas budaya internal komunitas tersebut. Dalam merespons tekanan dan diskriminasi struktural tersebut, komunitas Tionghoa mengembangkan berbagai bentuk institusi mandiri, termasuk organisasi sosial, lembaga pendidikan berbasis budaya Tionghoa, dan berbagai perkumpulan kemasyarakatan yang bertujuan mempertahankan warisan budaya sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah keterasingan sistemik (Salmon, 2009). Dengan demikian, walaupun ruang gerak mereka dibatasi oleh kebijakan kolonial, etnis Tionghoa tetap mampu menjaga eksistensi dan peran mereka dalam kehidupan sosial di Hindia Belanda melalui adaptasi yang cerdas dan kolektif.

Meskipun mengalami diskriminasi, etnis Tionghoa tetap berkontribusi terhadap perkembangan budaya di Kota Malang. Interaksi antara komunitas Tionghoa dan Belanda menciptakan bentuk akulturasi yang terlihat dalam arsitektur, gaya hidup, dan sistem pendidikan. Sekolah-sekolah Tionghoa yang berdiri sejak awal abad ke-20 memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat pendidikan komunitas ini (Sai, 2016). Beberapa sekolah mengadopsi kurikulum Barat dalam bahasa Belanda, sementara yang lain tetap mempertahankan ajaran budaya Tionghoa (Sai & Hoon, 2013).

Akulturasi juga terlihat dalam bidang seni, keagamaan, dan hiburan. Klenteng-klenteng di Malang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi komunitas Tionghoa. Salah satu klenteng tertua di Malang adalah Klenteng Eng An Kiong, yang berdiri sejak abad ke-19 dan menjadi simbol kuat keberadaan komunitas Tionghoa di kota ini. Klenteng ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya, seperti perayaan Cap Go Meh dan Festival Imlek (Sai, 2016). Selain itu, klenteng juga menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Tionghoa dalam menghadapi

berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang mereka alami di bawah pemerintahan kolonial. Komunitas Tionghoa mulai mengadopsi beberapa aspek gaya hidup kolonial, termasuk mode pakaian dan kebiasaan sosial yang dipengaruhi oleh budaya Eropa (Retnowati, 2024). Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan identitas budaya mereka melalui perayaan tradisional seperti Tahun Baru Imlek, yang tetap dirayakan meskipun terdapat pembatasan dari pemerintah kolonial (Vandenbosch, 1930). Dengan demikian, etnis Tionghoa di Malang menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan akar budaya mereka.

Selain organisasi sosial dan pendidikan, pemerintah kolonial Belanda juga mengangkat pemimpin komunitas Tionghoa dalam sistem administrasi mereka melalui jabatan *Luitenant der Chinezen*. Jabatan ini diberikan kepada tokoh-tokoh Tionghoa yang dianggap mampu mewakili komunitasnya dalam berbagai urusan pemerintahan kolonial, termasuk perpajakan, perdagangan, serta penyelesaian sengketa internal (Vandenbosch, 1930). Di Malang, beberapa individu Tionghoa yang menduduki jabatan ini berperan dalam menjembatani kepentingan komunitas mereka dengan pemerintah Belanda, meskipun sering kali harus menghadapi tekanan dari kedua belah pihak. Keberadaan *Luitenant der Chinezen* menjadi salah satu faktor yang memperkuat struktur sosial komunitas Tionghoa di Malang, sekaligus menjadi alat kontrol kolonial untuk mengawasi aktivitas mereka.

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik yang muncul sebagai dampak dari kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Hindia Belanda, komunitas Tionghoa di Malang secara aktif membentuk dan mengembangkan berbagai organisasi sosial dan kultural. Organisasi-organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mempererat solidaritas internal komunitas, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Tionghoa di tengah situasi sosial yang kompleks. Salah satu organisasi yang menonjol dalam konteks ini adalah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), yang memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan dan pelestarian identitas budaya. THHK didirikan dengan tujuan utama untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan Tionghoa mengenai pentingnya pendidikan modern, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya leluhur mereka di tengah arus modernisasi. Lebih dari sekadar lembaga pendidikan, THHK juga menjadi simbol perjuangan komunitas Tionghoa dalam memperoleh pengakuan sosial dan politik, khususnya dalam menanggapi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap warga Tionghoa. Dalam konteks ini, THHK berperan penting sebagai representasi suara komunitas Tionghoa dalam ranah publik, serta menjadi agen perubahan yang mendorong integrasi sosial tanpa kehilangan identitas etnis (Hudiyanto, 2007).

Selain peran penting yang dimainkan oleh organisasi berbasis pendidikan seperti Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), komunitas Tionghoa di Malang juga secara aktif membentuk berbagai asosiasi dagang sebagai strategi kolektif untuk melindungi dan memperkuat posisi ekonomi mereka dalam struktur sosial kolonial yang sarat akan ketimpangan. Organisasi-organisasi dagang ini tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi dan kerja sama antarpedagang Tionghoa, tetapi juga menjadi sarana efektif untuk menegosiasikan berbagai kebijakan perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam praktiknya, asosiasi dagang ini memiliki kapasitas untuk melakukan advokasi terhadap peraturan-peraturan yang dianggap merugikan atau mendiskriminasi kepentingan ekonomi komunitas Tionghoa, baik melalui jalur hukum maupun diplomasi sosial. Seiring berkembangnya jejaring perdagangan dan semakin kompleksnya relasi ekonomi antara komunitas Tionghoa dan otoritas kolonial, asosiasi dagang ini memainkan peran vital dalam menjaga keberlangsungan usaha, memperluas akses terhadap pasar, dan memediasi konflik antar kelompok ekonomi.

Dengan adanya institusi-institusi seperti ini, komunitas Tionghoa tidak hanya mampu bertahan dalam kondisi sosial-politik yang represif, tetapi juga berhasil menunjukkan daya adaptasi dan ketangguhan ekonomi yang luar biasa. Mereka terus berkembang dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di kota Malang, meskipun berada dalam sistem kolonial yang penuh pembatasan dan kontrol terhadap etnis minoritas (Claver, 2014).

Interaksi antara etnis Tionghoa dan Belanda tidak selalu berlangsung harmonis. Ketegangan sosial sering kali muncul akibat kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pajak yang lebih tinggi bagi pedagang Tionghoa dibandingkan kelompok lain menimbulkan protes dan perlawanan dari komunitas ini (Liempt & Boerstra, 1939). Beberapa organisasi Tionghoa berusaha menegosiasikan kebijakan yang lebih adil melalui perwakilan mereka di dewan kota (*Bataviasch Nieuwsblad*, 1896).

Menjelang akhir masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dinamika hubungan antara komunitas Tionghoa dan otoritas kolonial mengalami transformasi yang cukup signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan penduduk pribumi maupun kelompok etnis non-pribumi, termasuk etnis Tionghoa. Di tengah situasi sosial-politik yang semakin kompleks, komunitas Tionghoa mulai menunjukkan keberagaman sikap politik mereka terhadap pemerintah kolonial dan terhadap gerakan nasional yang tengah tumbuh. Munculnya semangat nasionalisme di berbagai wilayah Hindia Belanda menjadi pemicu lahirnya aspirasi baru dalam komunitas Tionghoa yang sebelumnya lebih cenderung berorientasi pada urusan ekonomi dan sosial budaya.

Sebagian anggota komunitas Tionghoa, khususnya generasi muda terdidik dan kalangan progresif, mulai mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia yang lebih luas, serta menyatakan dukungan terhadap gerakan kemerdekaan dan tuntutan atas hak-hak sipil yang setara bagi semua penduduk, tanpa memandang ras atau etnisitas (Schaik, 1996). Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula kelompok Tionghoa yang memilih mempertahankan posisi loyal terhadap pemerintah kolonial, baik karena alasan pragmatis, ekonomi, maupun keterikatan historis dengan struktur kolonial yang selama ini memberikan perlindungan tertentu kepada komunitas mereka (Sai, 2016). Polarisasi ini mencerminkan kompleksitas identitas politik komunitas Tionghoa menjelang keruntuhan kolonialisme, sekaligus menegaskan bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen secara ideologis, melainkan komunitas yang sedang bergulat dengan berbagai pilihan identitas dan strategi bertahan di tengah perubahan zaman yang cepat.

2) Interaksi Ekonomi Tionghoa-Belanda

Pada akhir abad ke-19, jumlah penduduk etnis Tionghoa di Malang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hudiyanto (2015) menjelaskan bahwa sebelum abad ke-20, populasi etnis Tionghoa di Malang diperkirakan hanya sekitar 1.200 jiwa. Namun, pada tahun 1930-an, jumlah ini meningkat hingga mencapai sekitar 4.500 jiwa (Liempt & Boerstra, 1939). Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan populasi lebih dari 270% dalam rentang kurang dari lima dekade, yang sebagian besar disebabkan oleh arus migrasi dari wilayah pesisir utara Jawa, seperti Semarang dan Surabaya, serta dari daratan Tiongkok, khususnya Provinsi Fujian dan Guangdong. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan populasi lebih dari 270% dalam rentang kurang dari lima dekade, yang sebagian besar disebabkan oleh arus migrasi dari wilayah pesisir utara Jawa, seperti Semarang dan Surabaya, serta dari daratan Tiongkok, khususnya Provinsi Fujian dan Guangdong.

Sebagian besar pendatang baru berasal dari kalangan pedagang dan pekerja sektor jasa, yang kemudian berkembang menjadi pengusaha di bidang perdagangan, perbankan, serta distribusi barang (Liempt & Boerstra, 1939). Data kolonial juga menunjukkan bahwa pada tahun 1925, lebih dari 60% etnis Tionghoa di Malang bergerak di sektor perdagangan,

sementara sekitar 20% lainnya berprofesi sebagai pemilik usaha kecil dan pekerja di sektor jasa, seperti perhotelan dan transportasi. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bekerja di sektor manufaktur atau pertanian, karena kebijakan kolonial yang membatasi akses mereka terhadap kepemilikan tanah dan investasi di sektor industri besar. Dengan demikian, pola migrasi dan pertumbuhan ekonomi komunitas Tionghoa di Malang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang dalam konteks kolonial. Selain berperan dalam perdagangan dan perkreditan, etnis Tionghoa juga mengelola berbagai pasar di Kota Malang. Pasar-pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan memberikan keuntungan besar bagi komunitas Tionghoa yang menguasai distribusi barang dan sistem perdagangan. Salah satu pasar terbesar yang dikelola oleh etnis Tionghoa adalah Pasar Besar Malang, yang sejak awal abad ke-20 telah menjadi pusat perniagaan utama di kota ini (Hudiyanto, 2007). Pasar ini menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai latar belakang, termasuk pribumi, Eropa, dan Tionghoa, sehingga memperkuat posisi komunitas Tionghoa dalam rantai ekonomi lokal. Selain Pasar Besar, terdapat juga pasar-pasar kecil lainnya yang dikelola oleh komunitas Tionghoa, seperti Pasar Klojen dan Pasar Splendid, yang memainkan peran penting dalam distribusi hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari bagi penduduk Malang (Retnowati, 2024).

Sejak abad ke-18, komunitas Tionghoa telah memainkan peran yang sangat signifikan dan bahkan dominan dalam perkembangan ekonomi Kota Malang. Peran mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan niaga kecil, tetapi mencakup penguasaan atas jaringan perdagangan lokal yang strategis serta keterlibatan aktif dalam distribusi barang ke berbagai wilayah penting di Pulau Jawa. Komoditas utama yang dikelola oleh pedagang Tionghoa meliputi bahan pangan pokok, kain dan tekstil, serta hasil-hasil pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pada masa itu (Hudiyanto, 2015). Melalui kemampuan mereka dalam membentuk dan mengelola jaringan dagang yang luas dan terorganisir, komunitas Tionghoa berhasil menjembatani antara produsen lokal di pedalaman dengan pasar-pasar kolonial yang lebih besar dan kompleks di kota-kota pelabuhan (Hudiyanto, 2007). Koneksi dagang ini tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi komunitas Tionghoa sebagai aktor ekonomi yang tidak tergantikan dalam struktur ekonomi kolonial. Dengan demikian, mereka tumbuh menjadi kelompok sosial yang tidak hanya berpengaruh secara ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan struktur sosial dan politik kota, terutama dalam konteks hubungan antara pemerintah kolonial dan masyarakat lokal.

Berdasarkan arsip-arsip kolonial yang terdokumentasi dengan baik, diketahui bahwa para pedagang Tionghoa pada masa Hindia Belanda memiliki akses yang luas dan strategis terhadap jaringan perdagangan internasional, baik melalui hubungan kekerabatan, asosiasi dagang, maupun koneksi dengan mitra bisnis di luar negeri. Keunggulan ini memberikan mereka kemampuan untuk memperoleh berbagai komoditas dan barang dagangan dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan pedagang bumiputera yang umumnya hanya bergantung pada jalur distribusi lokal yang terbatas (Vandenbosch, 1930). Kondisi ini memungkinkan para pedagang Tionghoa untuk menawarkan harga jual yang lebih rendah atau memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka mampu mendominasi sektor perdagangan di banyak wilayah, termasuk Kota Malang. Lebih dari sekadar mendominasi pasar lokal, keunggulan dalam jaringan internasional ini juga memperkuat posisi komunitas Tionghoa dalam sistem ekonomi kolonial secara keseluruhan, menjadikan mereka sebagai aktor ekonomi yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah kolonial maupun oleh kelompok masyarakat lainnya.

Interaksi ekonomi antara etnis Tionghoa dan Belanda di Kota Malang berkembang dalam berbagai sektor, terutama dalam perdagangan dan pengelolaan hasil perkebunan.

Pemerintah kolonial Belanda mengendalikan perkebunan besar seperti kopi dan gula, yang menjadi komoditas ekspor utama dari Jawa (Post, 2021). Dalam skema perdagangan ini, etnis Tionghoa berperan sebagai perantara yang membeli hasil panen dari petani bumiputera dan menjualnya kepada perusahaan dagang Belanda (Hudiyanto, 2015).

Pada tahun 1901, total kopi yang dikirim dari Malang mencapai 3.831 pikul, dan angka ini meningkat signifikan dalam dekade berikutnya, dengan lebih dari 60% distribusi kopi dikuasai oleh jaringan perdagangan Tionghoa (Liempt & Boerstra, 1939). Pada tahun 1915, jumlah kopi yang diekspor dari Malang meningkat menjadi sekitar 7.500 pikul, di mana 65% dari total ekspor dikelola oleh pedagang Tionghoa. Keberhasilan ini didukung oleh jaringan dagang yang luas, terutama dengan perusahaan ekspor Belanda yang berbasis di Batavia dan Surabaya. Selain itu, data menunjukkan bahwa pada tahun 1920, harga kopi yang diperdagangkan oleh komunitas Tionghoa di Malang meningkat sebesar 25% akibat permintaan tinggi dari pasar Eropa. Faktor ini semakin memperkuat posisi pedagang Tionghoa sebagai pengendali utama dalam rantai distribusi kopi di Jawa Timur. Selain itu, kebijakan pajak yang diterapkan kepada pedagang Tionghoa jauh lebih tinggi dibandingkan komunitas lain, dengan tarif pajak mencapai 15-20% lebih tinggi dibandingkan pedagang Eropa dan pribumi, terutama dalam sektor grosir dan impor barang dari Tiongkok (Liempt & Boerstra, 1939). Data dari arsip kolonial menunjukkan bahwa pada tahun 1925, pedagang Tionghoa di Malang membayar rata-rata 18% pajak keuntungan perdagangan, sedangkan pedagang Eropa hanya dikenai tarif sebesar 10-12%. Pajak tambahan ini mencakup bea impor dan retribusi ekspor, yang memberikan tekanan finansial lebih besar bagi pengusaha Tionghoa dibandingkan kelompok dagang lainnya. Meskipun demikian, mereka tetap mampu bertahan dengan mengembangkan strategi dagang yang lebih efisien dan memperluas jaringan ekonomi mereka hingga ke Singapura dan Hong Kong. Namun, komunitas Tionghoa tetap mampu bertahan melalui sistem keuangan berbasis keluarga dan jaringan dagang yang kuat (Seng, 2018).

Selain itu, komunitas Tionghoa juga aktif dalam menegosiasikan peraturan perdagangan melalui perwakilan mereka di dewan kota. Salah satu laporan dari surat kabar kolonial mencatat bagaimana asosiasi dagang Tionghoa berusaha menuntut peraturan pajak yang lebih adil dan mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi akibat kebijakan kolonial yang diskriminatif (*De Indische Courant*, 1922). Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial, komunitas Tionghoa tetap mampu mempertahankan eksistensinya dalam sistem kolonial.

Interaksi ekonomi antara kelompok pedagang dan pemerintah kolonial di Kota Malang tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa kasus di mana pihak kolonial lebih memilih rekan dagang tertentu dalam urusan ekonomi. Misalnya, pemerintah kolonial tidak menyetujui penunjukan sementara yang diberikan kepada seorang pedagang Tionghoa lokal dari Malang untuk memasok bahan makanan, bahan bakar, dan penerangan bagi Dinas Pekerjaan Umum (D.v.O.) di Malang selama tahun 1893-1895. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan wewenang kepada pengawas wilayah di Surabaya untuk membuat perjanjian pribadi dengan pedagang Tionghoa lain di Malang untuk pasokan tersebut (*Bataviasch Hanseblad*, 1892). Keputusan ini menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial memiliki kontrol penuh atas mekanisme perdagangan dan hanya memberikan kesempatan kepada pihak yang mereka anggap lebih menguntungkan bagi kepentingan Belanda.

Selain itu, data dari arsip kolonial menunjukkan bahwa tidak semua pedagang di Malang berhasil dalam bidang ekonomi. Beberapa individu mengalami kebangkrutan yang diumumkan secara resmi dalam surat kabar kolonial. Dalam pengumuman likuidasi dan kebangkrutan yang dimuat di surat kabar *Bataviasch Nieuwsblad*, tercatat beberapa pedagang Tionghoa di Malang yang mengalami kebangkrutan pada tahun 1895

(*Bataviasch Nieuwsblad*, 1895). Selain itu, pada tahun 1896, seorang pedagang Tionghoa lainnya di Malang juga mengalami kebangkrutan (*Bataviasch Nieuwsblad*, 1896). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak komunitas Tionghoa yang berhasil dalam perdagangan, sebagian dari mereka juga menghadapi tantangan ekonomi yang berat dalam sistem kolonial yang tidak selalu menguntungkan mereka.

Tidak hanya dalam bidang perdagangan, pengelolaan harta warisan juga menjadi perhatian utama dalam komunitas Tionghoa di Malang. Sebuah pengumuman dalam surat kabar *Java Bode* menginformasikan tentang proses penyelesaian beberapa harta warisan, termasuk milik orang Tionghoa yang meninggal tanpa wasiat di Malang. Harta ini dikelola oleh Kamar Harta Warisan Malang, yang bertugas mengoordinasikan proses administrasi serta penyelesaian utang-piutang yang terkait dengan aset tersebut (*Java Bode*, 1862). Keberadaan sistem pengelolaan warisan ini menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa di Malang memiliki keterlibatan yang kompleks dalam aspek ekonomi, tidak hanya dalam perdagangan aktif tetapi juga dalam aspek legal dan administratif yang berkaitan dengan aset dan warisan.

B. Interaksi Etnis Tionghoa dan Pribumi

Interaksi antara komunitas etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi di Indonesia merupakan salah satu dimensi penting dalam pembentukan lanskap sosial dan budaya bangsa ini. Sejak era pra-kolonial, hubungan antara kedua kelompok ini telah terbentuk melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Tiongkok dengan kepulauan Nusantara, yang kemudian diperkuat pada masa kolonial dengan hadirnya sistem ekonomi dan politik yang mempertemukan berbagai etnis dalam ruang geografis yang sama. Kota Malang, sebagai salah satu pusat ekonomi dan administrasi penting di wilayah Jawa Timur, memainkan peran strategis sebagai titik pertemuan berbagai kelompok etnis, termasuk komunitas Tionghoa dan masyarakat pribumi. Keberadaan komunitas Tionghoa di kota ini telah tercatat sejak akhir abad ke-18, beriringan dengan berkembangnya aktivitas perdagangan, urbanisasi, dan ekspansi kolonial. Komunitas Tionghoa yang datang ke Malang tidak bersifat homogen, melainkan terdiri dari individu-individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahkan afiliasi politik yang beragam. Mereka membawa serta nilai-nilai budaya leluhur namun juga terbuka terhadap pengaruh lokal. Hubungan awal dengan masyarakat pribumi umumnya didorong oleh kepentingan ekonomi, seperti kerja sama dalam perdagangan dan distribusi barang, tetapi seiring waktu interaksi ini berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks, mencakup proses akulturasi budaya, perkawinan campuran, pertukaran bahasa, serta keterlibatan dalam struktur sosial lokal. Dengan demikian, dinamika relasi antara komunitas Tionghoa dan masyarakat pribumi di Malang tidak hanya mencerminkan hubungan antar-etnis, tetapi juga menggambarkan bagaimana identitas, solidaritas, dan adaptasi sosial terbentuk dalam kerangka kolonial yang penuh tantangan dan perubahan.

Sejarah kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia menunjukkan bahwa mereka telah ada sejak jauh lebih awal daripada periode interaksi yang diteliti. Di Malang, seperti di banyak daerah lainnya, komunitas Tionghoa menjadi salah satu penopang ekonomi lokal melalui peran mereka sebagai pedagang, di mana mereka sering berkolaborasi dengan masyarakat lokal dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan hingga perayaan budaya (Suhadatina et al., 2021)(Pertiwi, 2021). Penelitian di daerah lain seperti di Bima mengungkapkan bahwa identitas etnis sering kali dibangun melalui praktik komunikasi yang harmonis, yang sejalan dengan apa yang terjadi di Malang, di mana asimilasi budaya juga terlihat dari perayaan-perayaan yang diadakan bersama, yang menyatukan kedua komunitas (Kadri & Wahid, 2021).

Namun, dinamika ini tidak selalu berlangsung mulus. Kebijakan rasial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda turut membentuk pola relasi yang hierarkis dan diskriminatif. Masyarakat dikelompokkan ke dalam sistem sosial berdasarkan ras: Eropa, Timur Asing (termasuk Tionghoa), dan pribumi. Klasifikasi ini menciptakan batas-batas sosial yang memperkuat segregasi, meskipun dalam praktiknya masyarakat Tionghoa dan pribumi tetap berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ketegangan pun tidak terhindarkan, terutama ketika persaingan ekonomi dan prasangka sosial ikut memperkeruh hubungan antar kelompok. Penelitian ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana kelompok-kelompok etnis di Indonesia membangun relasi di bawah tekanan struktur sosial kolonial yang menindas, sekaligus menunjukkan kapasitas masyarakat lokal dalam membangun solidaritas lintas etnis. Kota Malang sebagai locus penelitian menawarkan konteks lokal yang kaya, dengan jejak interaksi multikultural yang masih bisa ditelusuri hingga saat ini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap sejarah sosial Indonesia serta memberikan inspirasi bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran di masa kini.

1. Peran Komunitas Tionghoa dalam Ekonomi Lokal

Peran Komunitas Tionghoa dalam Ekonomi Lokal Komunitas Tionghoa di Malang sejak akhir abad ke-18 telah memainkan peran signifikan dalam perdagangan lokal. Mereka dikenal sebagai pengelola toko kelontong, perantara dagang, dan pelaku distribusi barang kebutuhan harian. Relasi mereka dengan masyarakat pribumi sebagian besar dibentuk oleh interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. Di sejumlah kawasan seperti Pecinan di Kota Malang, aktivitas perdagangan menjadi pusat kehidupan komunitas Tionghoa, yang turut menciptakan dinamika ekonomi baru di kawasan urban tersebut. Peran mereka tidak hanya terbatas sebagai pedagang eceran, tetapi juga berkembang menjadi pemodal atau tengkulak bagi petani pribumi. Ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara Tionghoa dan pribumi bukan semata-mata hubungan jual-beli, tetapi juga bentuk ketergantungan struktural yang mempererat interaksi keduanya. Dalam beberapa kasus, kemitraan ini juga berlangsung melalui pinjaman modal dan dukungan logistik dalam kegiatan pertanian maupun kerajinan masyarakat pribumi. Di Malang, meskipun terdapat potensi konflik, interaksi ini ternyata berhasil mempertahankan kecenderungan untuk bekerja sama demi tujuan ekonomi yang saling menguntungkan (Suhadatina et al., 2021). Kesadaran akan dampak sosial-ekonomi dari interaksi ini menjadi semakin penting ketika kita mempertimbangkan bagaimana masyarakat Tionghoa berinvestasi dalam lingkungan sosial dan ekonomi Malang. Keterlibatan mereka dalam sektor perdagangan dan investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga berkontribusi terhadap integrasi sosial yang lebih besar antara kedua kelompok etnis. Komunitas Tionghoa sering kali berkontribusi dalam proyek-proyek sosial bersama dan kegiatan kemasyarakatan, yang membantu memperkuat hubungan interpersonal di tingkat lokal (Makmur et al., 2018).

2. Asimilasi Budaya dan Praktik Sosial

Asimilasi Budaya dan Praktik Sosial Seiring waktu, komunitas Tionghoa mulai menunjukkan proses asimilasi dengan masyarakat lokal. Hal ini tampak dari penggunaan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari, penyesuaian gaya berpakaian, serta keterlibatan dalam perayaan hari besar keagamaan dan budaya lokal seperti Grebeg dan Sedekah Bumi. Akulturasi ini juga tampak dalam ranah kesenian, seperti munculnya bentuk kesenian hybrid seperti barongsai yang diiringi gamelan atau musik tradisional

Jawa dalam perayaan Imlek. Perkawinan antar etnis, meskipun tidak umum secara luas, menjadi salah satu saluran penting dalam memperkuat integrasi sosial. Anak-anak hasil pernikahan ini sering kali mengalami proses identifikasi ganda yang turut memperluas jembatan budaya antara komunitas Tionghoa dan pribumi. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat Tionghoa juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pembangunan sekolah, rumah ibadah lintas agama, dan organisasi amal. Dari perspektif yang lebih luas, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa kerjasama lintas etnis semacam ini dapat menghasilkan model interaksi multietnis yang positif. Interaksi ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pengembangan hubungan antarbudaya, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi ancaman prasangka dan xenofobia (Restiyati, 2021; Pramudito et al., 2024).

3. Diskriminasi dan Ketegangan Sosial dalam Sistem Kolonial

Kebijakan kolonial Belanda mengklasifikasikan masyarakat dalam tiga strata rasial: Eropa, Timur Asing (termasuk Tionghoa), dan Pribumi. Posisi Tionghoa sebagai "penengah" sering kali memicu kecurigaan dari masyarakat pribumi, sekaligus diskriminasi dari kelompok Eropa. Ketegangan ini diperparah oleh stereotip negatif dan kebijakan yang tidak adil. Namun, hubungan ini juga tak luput dari ketegangan yang mengakar. Dalam konteks kolonial yang lebih luas, orang Tionghoa sering diposisikan sebagai kelas kedua oleh penjajah Belanda, yang membagi masyarakat ke dalam kategori rasial yang ketat (Pertwi, 2021). Dalam kerangka ini, etnis Tionghoa menjadi sasaran prasangka dan stereotip yang merugikan, meskipun mereka juga mengembangkan strategi untuk mengatasi diskriminasi. Penelitian di kota-kota lain menunjukkan bahwa penggunaan bahasa serta simbol-simbol budaya lokal oleh etnis Tionghoa menjadi sarana untuk membangun identitas yang lebih diterima di antara masyarakat pribumi (Pelu & Purwanta, 2020). Dalam situasi tertentu, ketegangan ini memunculkan peristiwa kerusuhan dan eksklusi sosial terhadap warga Tionghoa, meskipun di Malang hal tersebut tidak meledak sebesar di wilayah lain seperti Batavia atau Surabaya. Namun, ketegangan tersebut tetap tercermin dalam pembatasan wilayah pemukiman, penggunaan bahasa, serta akses terhadap pendidikan dan administrasi. Prasangka bahwa orang Tionghoa hanya mementingkan keuntungan ekonomi turut memperkeruh relasi antar kelompok.

4. Strategi Adaptasi dan Ketahanan Sosial

Menghadapi tekanan sosial dan diskriminasi, komunitas Tionghoa mengembangkan berbagai strategi adaptasi. Salah satu strategi utama adalah penggunaan simbol-simbol budaya lokal, termasuk mengadopsi nama-nama Jawa dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial bersama masyarakat sekitar. Di sisi lain, komunitas Tionghoa juga memperkuat solidaritas internal melalui organisasi kemasyarakatan seperti Kong Koan dan perkumpulan sosial seperti Tiong Hoa Hwee Koan yang turut mempromosikan pendidikan dan kesadaran sosial. Selain itu, keterlibatan mereka dalam pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jaringan distribusi ekonomi menjadi bentuk kontribusi nyata yang memperkuat posisi sosial mereka di mata masyarakat luas. Dengan menjalin kolaborasi bersama tokoh-tokoh pribumi dalam kegiatan sosial keagamaan, komunitas Tionghoa tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat jaringan sosialnya secara multikultural.

Secara keseluruhan, hubungan antara Tionghoa dan pribumi di Malang membentuk model interaksi etnis yang dinamis. Dalam satu sisi mereka mengalami marginalisasi

struktural, namun di sisi lain mereka mampu menjadi agen integrasi sosial melalui kerja sama, asimilasi budaya, dan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara etnis Tionghoa, Belanda, dan pribumi di Kota Malang pada masa kolonial berlangsung dalam kerangka struktur sosial yang hierarkis dan sarat kepentingan kolonial. Etnis Belanda menempati posisi dominan dalam bidang politik dan administrasi, sementara etnis Tionghoa berperan penting dalam sektor ekonomi sebagai perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi. Sementara itu, masyarakat pribumi berada di posisi subordinat, baik secara ekonomi maupun politik. Meski terdapat batas-batas sosial yang kaku akibat kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial, hubungan antar etnis tidak sepenuhnya bersifat antagonistik; di beberapa ruang sosial seperti pasar dan lingkungan permukiman, terjadi interaksi yang bersifat pragmatis dan saling bergantung. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dan telaah historis yang kritis untuk memahami kompleksitas dinamika sosial masa lalu, yang dapat memberi perspektif terhadap isu-isu kebhinekaan dan integrasi sosial di masa kini.

Daftar Pustaka

- Bataviasch Nieuwsblad. (1895, April 20).
Bataviasch Nieuwsblad. (1896, November 21).
Claver, A. (2014). *Dutch commerce and Chinese merchants in Java: Colonial relationships in trade and finance, 1800–1942*. Brill.
De Indische Courant. (1922, September 23).
Hudiyanto, R. (2007). Pahlawan yang terlupakan: Pers Melayu, Etnik Thionghoa, dan nasionalisme di Kota Malang 1920–1950. *Humaniora*, 19(3), 215–223.
Hudiyanto, R. (2015). Kopi dan gula: Perkebunan di kawasan Regentschap Malang, 1832–1942. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 9(1).
Java Bode. (1862, Juni 21).
Junda, A. H. (2013). *Pasar-pasar di era Stadsgemeente Malang (1914–1942)* [Diploma thesis, Universitas Negeri Malang]. <https://repository.um.ac.id/54623/>
Kadri, M., & Wahid, A. (2021). Install identitas pribumi dalam praktik komunikasi etnik Tionghoa di Bima, Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1).
<https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.32423>
Liempt, F. van, & Boerstra, J. H. (1939). *Stadsgemeente Malang 1914–1939*. G. Kolff.
Makmur, M., Widjaja, H., & Lestari, D. (2018). *Kontribusi etnis Tionghoa dalam pembangunan sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Rakyat.
Pelu, M. F., & Purwanta, H. (2020). Pasang-surut relasi Tionghoa-Jawa di Surakarta: Studi kasus etnis Tionghoa di Kampung Balong. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 12(1). <https://doi.org/10.30959/patanjala.v12i1.539>
Pertiwi, D. A. (2021). Perkembangan sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science*, 3(1).
<https://doi.org/10.36761/kagangakomunika.v3i1.1062>
Post, P. (2021). Profitable partnerships: The Chinese business elite and Dutch lawyers in the making of Semarang. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(2), 214–245.
<https://doi.org/10.1017/S0022463421000448>
Pramudito, A. I., Utami, S., & Rahmawati, T. (2024). Gambaran kepuasan perkawinan pada pasangan antar etnis Jawa-Tionghoa. *Psikodimensia*, 22(2).
<https://doi.org/10.24167/psidim.v22i2.11162>
Restiyati, D. (2020). Bangunan cagar budaya berlanggam Tionghoa di Madiun. *Kindai*

- Etam: Jurnal Penelitian Arkeologi*, 6(1). <https://doi.org/10.24832/ke.v6i1.62>
- Retnowati, P. (2024). *Perkembangan Kota Malang 1914–1940: Suatu tinjauan sosial-ekonomi* [Diploma thesis, Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/129699/>
- Sai, S.-M. (2016). Mandarin lessons: Modernity, colonialism and Chinese cultural nationalism in the Dutch East Indies, c.1900s. *Inter-Asia Cultural Studies*, 17(3), 375–394. <https://doi.org/10.1080/14649373.2016.1217635>
- Sai, S.-M., & Hoon, C.-Y. (Eds.). (2013). *Chinese Indonesians reassessed: History, religion and belonging*. Routledge.
- Salmon, C. (2009). The Chinese community of Surabaya, from its origins to the 1930s crisis. *Chinese Southern Diaspora Studies*, 3, 22–60.
- Schaik, A. van. (1996). *Malang: Beeld van een stad*. Asia Maior.
- Seng, G.-Q. (2018). The gender politics of Confucian family law: Contracts, credit, and Creole Chinese bilateral kinship in Dutch colonial Java (1850s–1900). *Comparative Studies in Society and History*, 60(2), 390–414. <https://doi.org/10.1017/S0010417518000099>
- Suhadatina, A., Rachmawati, A., & Taufikurrahman, M. (2021). Kontruksi sosial Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan etnis Tionghoa. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 1226–1231. <https://doi.org/10.17977/um063v1i11p1226-1231>
- Vandenbosch, A. (1930). A problem in Java: The Chinese in the Dutch East Indies. *Pacific Affairs*, 3(11), 1001–1017. <https://doi.org/10.2307/2750073>

Catatan : Kebijakan baru mengenai jumlah halaman setiap nomor terbitan, maka halaman naskah yang akan diterbitkan minimal 15 halaman